



Navigasi Etika di Era Digital: Analisis Kritis Perilaku Komunikasi Masyarakat Indonesia di Media Sosial

Taslimahudin

Universitas Ibnu Sina Batam, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 18, 2026

Revised September 21, 2026

Accepted September 22, 2026

Available online September 24, 2026

Kata Kunci :

Etika komunikasi digital, Media sosial, Hoaks, Keamanan siber, Literasi digital, Indonesia

Keywords:

Digital communication ethics, Social media, Hoaxes, Cybersecurity, Digital literacy, Indonesia



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Komunikasi melalui media sosial mempertemukan kebutuhan berbagai informasi dengan kewajiban menjaga kebenaran, privasi, dan martabat orang lain. Artikel ini bertujuan memetakan dimensi etika komunikasi digital, menelaah hubungan antartantangan, dan merumuskan arah kolaborasi pemangku kepentingan dalam konteks Indonesia. Kajian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tinjauan literatur naratif terhadap 14 rujukan periode 2023–2025 yang dipertahankan setelah pemeriksaan daftar pustaka awal. Pembahasan disusun melalui pemetaan tema dan perbandingan argumentasi antarsumber, dengan membedakan kajian kontekstual Indonesia dari rujukan konseptual. Sintesis menghasilkan lima dimensi yang saling berkaitan, yaitu akurasi informasi dan kebenaran, privasi dan keamanan data, tanggung jawab sosial, kesantunan dan empati, serta literasi digital. Analisis menunjukkan bahwa tuntutan verifikasi, perlindungan pengguna, dan kebebasan berekspresi perlu dipertimbangkan secara bersamaan. Kerangka kolaborasi pemerintah, platform digital, institusi pendidikan, masyarakat sipil, dan individu dirumuskan sebagai usulan konseptual penulis yang memerlukan pengujian empiris. Cakupan rujukan dan keterbatasan dokumentasi penelusuran membatasi keterulangan kajian serta generalisasi temuan. Kontribusi artikel terletak pada pengaitan kelima dimensi dengan pembagian tanggung jawab dan arah evaluasi praktik komunikasi digital, bukan pada pengukuran prevalensi perilaku masyarakat Indonesia.

ABSTRACT

Social media communication connects the need to share information with obligations to protect truth, privacy, and human dignity. This article aims to map the dimensions of digital communication ethics, examine relationships among ethical challenges, and formulate directions for stakeholder collaboration in Indonesia. It adopts a qualitative descriptive approach through a narrative literature review of 14 references published between 2023 and 2025 and retained after checking the initial bibliography. The discussion uses thematic mapping and comparison of arguments across sources, distinguishing Indonesian contextual studies from conceptual references. The synthesis identifies five interrelated dimensions: information accuracy and truth, privacy and data security, social responsibility, courtesy and empathy, and digital literacy. The analysis indicates that verification, user protection, and freedom of expression require joint consideration. Collaboration among government, digital platforms, educational institutions, civil society, and individuals is presented as the author's conceptual proposal requiring empirical evaluation. The limited reference base and incomplete search documentation constrain reproducibility and generalizability. The article contributes by connecting these dimensions to responsibilities and evaluation priorities for digital communication practices, rather than estimating the prevalence of communication behaviors across Indonesian society.

1. PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi ruang pertukaran informasi, pembentukan pendapat, dan interaksi sosial yang menempatkan pengguna sekaligus sebagai penerima dan penyebar pesan. Dalam ruang ini, etika komunikasi mencakup pertimbangan mengenai kebenaran isi, hak pihak yang dibicarakan, serta akibat penyebaran pesan. Kajian (Meidiaputri & Mukhlis, 2023) menekankan perlunya pendidikan tentang penggunaan media sosial secara bijak. (Hamama, 2024) juga menempatkan tantangan dan solusi etika komunikasi sebagai perhatian dalam penggunaan media sosial.

Persoalan etika digital perlu dibedakan menurut objek perlindungannya. Informasi yang keliru mengganggu penilaian publik; penggunaan data pribadi yang tidak tepat mengancam privasi; dan interaksi yang merendahkan dapat merugikan pihak yang menjadi sasaran. (Prasetyo et al., 2024) menekankan perlindungan data dan privasi sebagai bagian etika siber. Dalam lingkup remaja, (Harahap et al., 2024) melaporkan manfaat sekaligus risiko penggunaan media sosial berdasarkan survei pada 23 siswa. Temuan lokal tersebut relevan sebagai petunjuk masalah, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan seluruh remaja Indonesia.

Kajian terdahulu memiliki titik tekan yang berbeda. (Meidiaputri & Mukhlis, 2023) membahas etika interaksi melalui tinjauan pustaka, sedangkan (Nababan, 2023) menelaah strategi literasi digital dalam konteks Yogyakarta. (Khuryati et al., 2024) menempatkan pendidikan etika bermedia sosial dalam kegiatan pengabdian kepada pelajar. Pada tingkat struktur komunikasi, (Amril & Sazali, 2025) membahas keterkaitan algoritma, literasi digital, dan regulasi. Perbedaan cakupan tersebut membuka kebutuhan untuk membandingkan tanggung jawab pengguna dengan tanggung jawab institusi dan platform.

Celah yang menjadi fokus artikel ini ialah kebutuhan akan pemetaan yang menghubungkan lima dimensi etika dengan batas bukti dan tanggung jawab para pelaku. Artikel ini tidak mengasumsikan bahwa hubungan antardimensi sama sekali belum dibahas. Kebaruannya ditempatkan secara terbatas pada penyusunan sintesis konseptual yang memperlihatkan ketegangan antara verifikasi informasi, perlindungan privasi, kesantunan, dan kebebasan berekspresi, serta menghubungkannya dengan arah tindakan yang dapat dievaluasi.

Rumusan masalah kajian ini adalah bagaimana literatur 2023–2025 menjelaskan dimensi etika komunikasi digital yang relevan bagi Indonesia, bagaimana dimensi tersebut berhubungan, dan bagaimana tanggung jawab penanganannya dapat dibagi. Tujuannya meliputi pemetaan isu kritis, perumusan prinsip etika, pembahasan hambatan penerapan, serta penyusunan rekomendasi kolaborasi pemangku kepentingan. Istilah analisis kritis digunakan untuk menunjukkan perbandingan cakupan sumber, penilaian batas inferensi, dan pembahasan konflik nilai; istilah tersebut tidak merujuk pada pengujian kausal perilaku pengguna.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan cakupan kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tinjauan literatur naratif. Bahan kajian berasal dari daftar rujukan naskah awal dengan rentang publikasi 2023–2025. Unit analisis adalah argumentasi dan isu etika yang dibahas dalam literatur, bukan individu pengguna media sosial. Tidak dilakukan pengumpulan data primer, survei baru, atau observasi baru terhadap akun media sosial dalam kajian ini.

Naskah awal menyebut 45 artikel hasil penelusuran dan 15 artikel terpilih, tetapi tidak menyertakan daftar hasil pencarian, tanggal penelusuran, catatan duplikasi, keputusan penyaringan judul dan abstrak, ataupun alasan eksklusi teks lengkap. Oleh karena itu, angka

45 tidak digunakan sebagai alur seleksi yang dapat diaudit dan istilah tinjauan literatur sistematis tidak dipertahankan. Penyesuaian ini membatasi klaim metode sesuai dokumentasi yang tersedia, tanpa merekonstruksi tahapan yang tidak tercatat.

Sumber rujukan dan pemeriksaan kelayakan

Naskah awal menyebut Google Scholar dan Portal Garuda sebagai sarana penemuan literatur, serta ResearchGate dan repositori perguruan tinggi sebagai sarana akses. ResearchGate diposisikan sebagai jejaring berbagi publikasi, bukan basis data bibliografis yang setara dengan portal pengindeks. Waktu pencarian awal tidak tersedia. Pemeriksaan rujukan pada tahap revisi dilakukan pada 21 September 2026 melalui laman penerbit dan tautan pengenalan publikasi yang tercantum, tanpa memperluas batas tahun literatur.

Pemeriksaan revisi berfokus pada kesesuaian identitas publikasi, rentang tahun, hubungan topik dengan etika komunikasi digital, dan peran sumber dalam argumentasi. Rujukan di luar konteks Indonesia ditempatkan sebagai penunjang konseptual. Publikasi dengan identitas yang tidak dapat dipastikan tidak dipakai untuk mendukung klaim substantif. Satu entri yang pada naskah awal menggunakan nama “Jurnal Serina Sains, Teknik dan Kedokteran” sebagai penulis dikeluarkan karena identitas penulis dan publikasinya belum dapat dikonfirmasi. Dengan demikian, versi revisi memuat 14 rujukan, bukan 15 artikel empiris yang seluruhnya setara.

Pemeriksaan metadata tidak diperlakukan sebagai penilaian mutu metodologis formal. Kualitas dukungan dibahas melalui kesesuaian lingkup klaim dengan rancangan dan konteks sumber yang dapat ditelusuri. Tinjauan konseptual, studi lokal, dan laporan pengabdian mempunyai fungsi bukti yang berbeda. Tidak diberikan skor mutu, jumlah artikel duplikat, atau tingkat kesepakatan penilai karena dokumentasi untuk menghitungnya tidak tersedia. Beberapa metadata dan akses teks lengkap masih memerlukan pencocokan dengan arsip penulis.

Pemetaan dan interpretasi

Sintesis revisi dilakukan dengan mengelompokkan pokok bahasan rujukan ke dalam lima dimensi, kemudian membandingkan hubungan dan ketegangan antardimensi. Akurasi mencakup pemeriksaan kebenaran pesan; privasi mencakup perlindungan informasi pribadi; tanggung jawab sosial mencakup akibat penyebaran; kesantunan dan empati mencakup perlakuan terhadap orang lain; dan literasi digital mencakup kemampuan menilai serta menggunakan media secara bertanggung jawab. Satu sumber dapat berkaitan dengan lebih dari satu dimensi. Tabel 1 menunjukkan fungsi rujukan dan bukan hasil penghitungan frekuensi tema.

Interpretasi dibedakan menjadi uraian yang dirujuk kepada literatur, pengaitan konseptual oleh penulis, dan usulan tindakan. Perbandingan antarsumber digunakan untuk membatasi generalisasi, bukan sebagai bukti otomatis bahwa semua temuan telah tervalidasi. Klaim triangulasi formal dan diskusi penelaahan sejawat pada naskah awal tidak dipertahankan karena catatan pelaksanaannya tidak disertakan. Kajian ini tidak menghasilkan ukuran pengaruh, hubungan sebab-akibat, maupun estimasi keterwakilan nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan rujukan dan posisi bukti

Literatur yang dipertahankan menunjukkan keragaman fokus: etika komunikasi umum, pendidikan pengguna, perlindungan data, kebenaran informasi, dan tata kelola ruang digital. Keragaman ini berguna untuk menyusun kerangka konseptual, tetapi membuat penyamaan

semua sumber sebagai bukti empiris nasional tidak tepat. Tabel 1 memperlihatkan keterkaitan seluruh 14 rujukan dengan pembahasan. Pemetaan mengikuti fokus publikasi dan uraian yang dapat ditelusuri; rincian desain yang belum terkonfirmasi tidak diisi dengan dugaan.

Tabel 1. Pemetaan rujukan dan batas penggunaannya

Rujukan	Fokus sumber	Dimensi terkait	Batas penggunaan
Amril & Sazali (2025)	Algoritma, literasi, dan regulasi	Tanggung jawab sosial; literasi	Hubungan struktural; bukan ukuran efek algoritma.
(Siregar et al., 2024)	Etika komunikasi dan kebenaran	Akurasi; privasi; tanggung jawab	Prinsip etis; tidak menjadi sumber statistik nasional.
Hamama (2024)	Tantangan dan solusi etika media sosial	Tanggung jawab sosial	Rujukan tema etika komunikasi; rincian teks perlu dicocokkan.
Harahap et al. (2024)	Survei pada 23 siswa	Kesantunan; tanggung jawab	Bukti lokal; tidak mewakili semua remaja.
Khuryati et al. (2024)	Sosialisasi kepada pelajar	Kesantunan; literasi	Laporan pengabdian; bukan uji perubahan jangka panjang.
(Marpaung & Sazali, 2025)	Studi kasus konflik dan hukum	Tanggung jawab sosial	Konteks publikasi; bukan status regulasi terkini.
Meidiaputri & Mukhlis (2023)	Tinjauan pustaka etika komunikasi	Kesantunan; tanggung jawab	Sintesis sekunder; bukan pengamatan pengguna baru.
Nababan (2023)	Strategi literasi di Yogyakarta	Literasi; tanggung jawab	Konteks daerah; penerapan di tempat lain perlu diuji.
(Nurhayati et al., 2025)	Perspektif etika digital pelajar	Literasi; kesantunan	Fokus publikasi; tidak mendukung klaim perbandingan generasi.
Prasetyo et al. (2024)	Etika siber deskriptif kualitatif	Privasi dan keamanan data	Dasar etika perlindungan; bukan jumlah serangan siber.
(Setia & Dilawati, 2024)	Komunikasi keagamaan dan hoaks	Akurasi; literasi	Konteks keagamaan; tidak mencakup semua komunikasi.
(Triwulan et al., 2024)	Etika jurnalisme digital	Akurasi; tanggung jawab	Fokus penyebaran berita; metadata perlu dicocokkan.
(Wojtyła, 2023)	Argumentasi kebenaran dan keadilan	Akurasi dan kebenaran	Landasan konseptual; bukan studi empiris Indonesia.
(Zuhri & Arif, 2024)	Literasi dalam disrupsi digital	Literasi digital	Panduan konseptual; bukan pengukuran efek nasional.

Lima dimensi etika komunikasi digital

Akurasi informasi dan kebenaran berhubungan dengan dasar suatu klaim dapat dipercaya. Bustami et al. (2024) menempatkan akurasi, kejelasan, keadilan, dan tanggung

jawab sebagai prinsip komunikasi. Wojtyła (2023) memberi pijakan konseptual tentang hubungan kebenaran dan keadilan, sedangkan Setia dan Dilawati (2024) membahas tantangan hoaks dalam komunikasi keagamaan. Ketiganya dapat dipertemukan pada kebutuhan alasan yang dapat diperiksa, meskipun cakupan dan pendekatannya berbeda. Dalam sintesis penulis, popularitas pesan tidak cukup menjadi dasar kebenaran; pesan perlu dinilai berdasarkan sumber, konteks, dan ketepatan representasinya.

Privasi dan keamanan data berhubungan dengan perlindungan pihak yang informasinya digunakan. Prasetyo et al. (2024) menekankan penggunaan informasi pribadi secara tepat, sedangkan Bustami et al. (2024) memasukkan privasi ke dalam hak pengguna. Pengaitan kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebenaran suatu informasi belum dengan sendirinya membenarkan penyebarannya. Sebagai ilustrasi konseptual, unggahan identitas seseorang yang akurat tetap memerlukan pertimbangan tujuan, persetujuan, dan risiko kerugian. Ilustrasi ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antardimensi, bukan sebagai temuan empiris baru.

Tanggung jawab sosial memperluas penilaian etis dari niat pengirim menuju dampak pesan. Kajian etika komunikasi Meidiaputri dan Mukhlis (2023) serta Hamama (2024) relevan dengan peran pengguna dalam ruang bersama. Dalam konteks berbeda, Triwulan et al. (2024) menyoroti etika jurnalisme digital dan penyebaran berita. Sintesis penulis menempatkan pemeriksaan konteks dan kesediaan mengoreksi pesan sebagai konsekuensi tanggung jawab tersebut. Tuntutan verifikasi juga perlu ditopang mekanisme koreksi pada media dan platform karena kemampuan individu untuk menghentikan penyebaran informasi terbatas.

Kesantunan dan empati berhubungan dengan cara memperlakukan lawan bicara dan pihak yang dibicarakan. Harahap et al. (2024) melaporkan risiko penindasan maya serta sensitivitas terhadap komentar dalam konteks siswa yang diteliti. Khuryati et al. (2024) menawarkan pendidikan etika melalui ceramah dan diskusi kepada pelajar. Kedua sumber mendukung perhatian pada pendidikan interaksi, tetapi tidak membuktikan bahwa satu intervensi berlaku sama untuk semua kelompok. Dalam sintesis ini, kesantunan berarti menghindari perendahan martabat sambil tetap menyediakan ruang bagi kritik yang beralasan.

Literasi digital menghubungkan kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan memproduksi informasi dengan pertimbangan etis. Nababan (2023) menguraikan strategi literasi dalam konteks Yogyakarta; Zuhri dan Arif (2024) membahas literasi sebagai panduan menghadapi disrupsi digital. Nurhayati et al. (2025) menempatkan perspektif etika pelajar sebagai fokus kajian. Sumber terakhir digunakan sesuai fokus tersebut dan tidak dijadikan bukti perbandingan generasi. Literasi diposisikan sebagai kapasitas pendukung keempat dimensi sebelumnya, tanpa mengasumsikan bahwa peningkatan pengetahuan otomatis mengubah perilaku.

Hubungan antardimensi dan tantangan penerapan

Kelima dimensi tidak bekerja sebagai daftar kewajiban yang terpisah. Dalam penafsiran penulis, akurasi memberikan dasar bagi keputusan berbagi; privasi membatasi informasi yang patut disebarluaskan; tanggung jawab sosial mempertimbangkan konsekuensi; kesantunan mengarahkan bentuk interaksi; dan literasi membantu pengguna menilai pilihan tersebut. Keterkaitan ini menjelaskan mengapa sebuah pesan dapat benar secara faktual tetapi tetap bermasalah secara etis, atau santun dalam bentuknya tetapi menyebarkan informasi yang keliru.

Pada tingkat individu, tantangan utama ialah mengubah pengetahuan menjadi keputusan ketika pengguna menghadapi tekanan untuk segera merespons. Pendidikan etika pada pelajar dan strategi literasi komunitas menunjukkan dua jalur penanganan yang berbeda (Khuryati et

al., 2024; Nababan, 2023). Namun, laporan sosialisasi tidak dapat disamakan dengan bukti perubahan perilaku jangka panjang. Evaluasi perlu membedakan kemampuan menjawab pertanyaan etika dari kebiasaan memeriksa informasi dan mengoreksi unggahan dalam praktik sehari-hari.

Pada tingkat platform, Amril dan Sazali (2025) mengaitkan persoalan etika dengan algoritma, budaya viralitas, literasi, dan regulasi. Artikel ini menggunakan hubungan tersebut sebagai dasar pembahasan struktural, bukan sebagai estimasi pengaruh setiap algoritma. Menurut penafsiran penulis, seruan kepada pengguna untuk lebih berhati-hati akan terbatas apabila fitur penyebaran dan insentif visibilitas terus memberi keuntungan pada pesan yang memancing reaksi. Karena itu, tanggung jawab pengguna perlu dipertemukan dengan keterbukaan kebijakan dan sarana pengaduan platform.

Pada tingkat tata kelola, Marpaung dan Sazali (2025) membahas konflik pengguna dalam hubungannya dengan penafsiran ketentuan hukum. Temuan tersebut dibaca sebagai pembahasan pada periode publikasinya, bukan uraian status hukum terkini. Tantangan etis yang ditarik dalam kajian ini adalah menjaga perlindungan dari kerugian sekaligus ruang kritik. Usulan penanganan membutuhkan kriteria yang dapat dijelaskan, kesempatan memberi klarifikasi, dan mekanisme keberatan. Penambahan aturan saja belum menjadi bukti tercapainya komunikasi yang lebih etis.

Konteks Indonesia dalam kajian ini ditunjukkan oleh lingkup sekolah, komunitas, komunikasi keagamaan, dan perdebatan tata kelola yang terdapat dalam rujukan. Konteks tersebut tidak membenarkan anggapan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mempunyai satu pola budaya komunikasi yang seragam. Perbedaan tujuan, kelompok pengguna, dan situasi interaksi perlu menjadi bagian dari penelitian lanjutan. Kontribusi analisis kritis terletak pada pembatasan tersebut serta pada penjelasan bahwa kepentingan akurasi, privasi, kesantunan, dan kebebasan berekspresi dapat berhadapan dalam satu situasi komunikasi.

Usulan kerangka kolaborasi pemangku kepentingan

Arah pendidikan literasi, perlindungan pengguna, dan tata kelola kolaboratif telah dibahas dari sudut berbeda dalam literatur. Berdasarkan arah tersebut, penulis merumuskan pembagian peran dan indikator evaluasi pada Tabel 2. Tindakan dan indikator dalam tabel merupakan usulan konseptual artikel ini, bukan hasil uji efektivitas program atau kesepakatan empiris seluruh sumber. Kerangka ini dimaksudkan untuk membuat rekomendasi dapat ditindaklanjuti dan diuji.

Tabel 2. Usulan peran dan arah evaluasi kolaborasi

Pelaku	Usulan tindakan penulis	Arah evaluasi yang diusulkan
Pemerintah	Pendidikan publik dan perlindungan hak pengguna	Kejelasan kanal pengaduan dan tindak lanjut yang dapat ditelusuri.
Platform digital	Penjelasan kebijakan, alat pelaporan, dan mekanisme keberatan	Waktu tindak lanjut, alasan keputusan, dan akses pengguna terhadap koreksi.
Institusi pendidikan	Latihan verifikasi, persetujuan berbagi data, dan diskusi etika	Perubahan kemampuan pada tugas berbasis kasus dan evaluasi lanjutan.
Masyarakat sipil	Pendampingan komunitas dan pemeriksaan informasi	Jangkauan kelompok sasaran dan keterlacakan koreksi informasi.

Pelaku	Usulan tindakan penulis	Arah evaluasi yang diusulkan
Individu	Pemeriksaan sumber, penghormatan privasi, dan koreksi unggahan	Kebiasaan verifikasi dan kesediaan memperbaiki pesan yang keliru.

Pelaksanaan kerangka dapat dimulai dari satu konteks terbatas, misalnya komunitas sekolah, dengan menetapkan masalah dan indikator yang relevan. Evaluasi perlu memeriksa perubahan kemampuan verifikasi, penggunaan persetujuan sebelum berbagi informasi pribadi, dan kualitas respons terhadap perbedaan pendapat. Pengukuran sebaiknya dilakukan pada lebih dari satu waktu dan memperhatikan kondisi awal serta kemungkinan dampak yang tidak diinginkan. Rancangan evaluasi tersebut merupakan agenda penelitian berikutnya; keberhasilan kerangka belum dibuktikan oleh kajian ini.

4. KESIMPULAN

Tinjauan literatur ini memetakan lima dimensi etika komunikasi digital yang relevan bagi pembahasan konteks Indonesia, yaitu akurasi informasi dan kebenaran, privasi dan keamanan data, tanggung jawab sosial, kesantunan dan empati, serta literasi digital. Pengaitan antardimensi menunjukkan bahwa penilaian etis memerlukan pemeriksaan isi, cara penyampaian, hak pihak yang terdampak, dan konsekuensi penyebaran pesan. Kesimpulan ini merupakan sintesis konseptual atas literatur dan tidak menyatakan tingkat prevalensi pelanggaran pada masyarakat Indonesia.

Hambatan penerapan berhubungan dengan kapasitas pengguna, kondisi interaksi pada platform, dan tata kelola perlindungan serta kebebasan berekspresi. Penulis mengusulkan pembagian tanggung jawab antara pemerintah, platform, institusi pendidikan, masyarakat sipil, dan individu, disertai arah evaluasi yang dapat diuji. Implikasi praktisnya adalah perlunya menghubungkan pendidikan pengguna dengan dukungan kelembagaan dan perbaikan mekanisme komunikasi digital.

Kajian ini terbatas pada 14 rujukan yang dipertahankan dari 15 entri awal, periode publikasi 2023–2025, dan ruang penelusuran yang dilaporkan dalam naskah awal. Ketiadaan catatan pencarian, penyaringan, serta penilaian kualitas formal membatasi keterulangan kajian. Keragaman desain sumber, keterbatasan akses teks lengkap, dan penggunaan rujukan konseptual juga membatasi kekuatan inferensi. Temuan tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh pengguna, wilayah, atau platform di Indonesia. Penelitian berikutnya perlu mendokumentasikan penelusuran secara lengkap serta menguji kerangka melalui studi lapangan pada kelompok dan konteks yang jelas.

5. REFERENSI

- Amril, & Sazali, H. (2025). Krisis Etika Komunikasi di Media Sosial: Analisis Multidisipliner terhadap Peran Algoritma, Literasi Digital, dan Regulasi dalam Mewujudkan Ruang Publik Digital yang Bertanggung Jawab. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(2), 1342–1352. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1424>
- Hamama, S. (2024). Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Tantangan dan Solusinya. *Jurnal Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah*, 4(2), 182–197. <https://doi.org/10.33507/selasar.v4i2.2608>
- Harahap, A. S., Nabila, S., Sahyati, D., Tindaon, M., & Batubara, A. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Etika Remaja Di Era Digital. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(2), 9. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.19>
- Khuryati, A., Putra, Y. A., Meilizia, D. R., Nuraliza, S. M., Fadillah, H., Nurkhalisah, N., & Kaharudin, M. J. (2024). Penguatan Etika Bermedia Sosial Dalam Kalangan Pelajar Di

- Era Society 5.0. *Altifani : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah*, 3(2), 165–181. <https://doi.org/10.32939/altifani.v3i2.3135>
- Marpaung, H. W., & Sazali, H. (2025). Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas User Conflicts di Media Sosial. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(2), 1439–1450. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1438>
- Meidiaputri, R. D., & Mukhlis, I. (2023). Etika Komunikasi dalam Menggunakan Media Sosial (Suatu Kajian Literatur). *Cognoscere: Jurnal Komunikasi Dan Media Pendidikan*, 1(2), 21–29. <https://doi.org/10.61292/cognoscere.v1i2.71>
- Nababan, S. (2023). Digital Media Literacy Strategy for the Information Disruption Era in Improving the Communication Ethics of the Yogyakarta Community. *International Journal of Science and Society*, 5(2), 223–232. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i2.689>
- Nurhayati, Sembiring, A. B., Salsabilla, A. Z., Haziq, J. S., Juliana, Handayani, N., & Fadhilah, Z. (2025). Memahami Perspektif Etika Digital di Kalangan Pelajar Pendekatan Kualitatif terhadap Penggunaan Media Sosial. *JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 246–260. <https://doi.org/10.71456/adc.v3i3.1283>
- Prasetyo, D. A., Setiawan, F. D., Kapoyos, J. M., Gusnaldi, M. R., & Fadholi, W. H. N. (2024). Pentingnya Etika Siber Pada Era Digital. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 2, 1130–1137.
- Setia, P., & Dilawati, R. (2024). Religiosity in the Digital Era and the Challenges of Hoaxes, Post-Truth and Radicalism on Social Media. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 4(1), 67–76. <https://doi.org/10.15575/jis.v4i1.33230>
- Siregar, A. R., Harahap, A., & Nasution, M. S. (2024). Etika komunikasi media digital di era post-truth. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 5(1), 39–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jpmmmpi.v5i1.91604>
- Triwulan, D., Ramadhani, N., Zannah, N., Naibaho, M., & Effendi, E. (2024). Tantangan Etika dalam Jurnalisme Digital: Studi Kasus Peran Media Sosial dalam Penyebaran Berita. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(3). <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i3.681>
- Wojtyła, W. (2023). From Post-Truth to Post-Justice? In Defence of Truth in the Era of Post-Truth. A Contribution to the Debate. *Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie*, 16(2), 401–413. <https://doi.org/10.32084/tkp.5311>
- Zuhri, S., & Arif, R. (2024). Digital Literacy As A Media Guide Amid Digital Disruption (Study of The Importance of Digital Literacy in The Era of Globalization). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(01), 232–246. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i01.882>